

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat telah berlangsung cukup lama, hal itu dimulai sejak diberikannya hak konsensi penambangan minyak di bagian Timur Arab Saudi kepada konsorium pertambangan minyak Amerika Serikat di tahun 1939. Hubungan kedua negara memang mengalami dinamika pasang surut (*up and down*) dari waktu ke waktu.

Terhadap sistem politiknya, Arab Saudi menggunakan sistem monarki absolut. Undang-Undang Dasar Arab Saudi diadopsi dari dekrit Raja pada tahun 1992, dimana Raja harus tunduk kepada hukum Syariat dan Quran, sedangkan Quran dan Sunnah diposisikan sebagai konstitusi negara. Sistem politik Arab Saudi tidak mengenal partai politik atau pemilihan umum nasional. Kondisi ini memunculkan banyak kritik yang menganggapnya sebagai kediktatoran totaliter. Dan dalam sistem politik dan pemerintahan Saudi, ulama memiliki posisi dan peran strategis dalam sistem politik kerajaan Saudi. Dalam sebuah negara yang berasaskan Islam, para ulama menduduki berbagai posisi dalam masyarakat atau negara baik secara formal maupun informal seperti, sebagai mufti, Qadhi (hakim), Khatib (penceramah), Mudarris (guru, dosen).

Secara historis ulama memiliki otoritas yang kuat dalam masyarakat karena menjadi penafsir dan penjaga sikap dan perilaku masyarakat serta menjadi tempat masyarakat bertanya tentang hukum/legalitas dalam perbuatan mereka. Hubungannya dengan pemerintah, Ulama biasanya menjadi penasihat bagi pemerintah, pemberi fatwa, pemegang otoritas dalam pendidikan dan kehakiman. Ulama juga berperan sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Para ulama memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, misalnya pengenaan embargo minyak pada tahun 1973 dan undangan untuk pasukan asing ke Arab Saudi pada tahun 1990. Selain itu, mereka memiliki peran

utama dalam sistem peradilan dan pendidikan dan monopoli kekuasaan di bidang moral keagamaan dan sosial.

Pemerintahan Arab Saudi yang berbentuk monarkhi absolut mengharuskan penguasanya adalah seorang Raja yang sebelumnya merupakan Putera Mahkota. Tidak sedikit para pangeran Saudi yang menginginkan posisi ini. Pada masa Raja Salman misalnya, konflik internal terjadi akibat tindakan Raja Salman yang menobatkan putera sulung dari istri ketiganya menjadi Pangeran Putera Mahkota. Hal ini memicu kemarahan para saudara Raja Salman, hingga ada yang berani memberikan surat agar Raja Salman dilengserkan.

Raja Salman mengalami krisis legitimasi kekuasaan. Selain akibat dari konflik internal para Pangeran, Raja Salaman pun harus menghadapi kelompok-kelompok syiah yang ada di Arab Saudi yang ditakutkan menyebarkan aliran syiah disana. Selain itu, adanya rasa tidak puas dari masyarakat yang merasa kebebasan mereka terbatas dan kemakmuran mereka terhambat, semakin membuat Raja Salman waspada pada masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, Arab Saudi khususnya Raja Salman membutuhkan Amerika Serikat guna melindungi masa pemerintahannya beserta wilayah kekuasaannya dari berbagai macam konflik yang mungkin dapat terjadi.

Pada tahun 1951, di bawah suatu persetujuan timbal balik, Amerika Serikat membentuk misi pelatihan militer di Arab Saudi dan bersedia menyediakan pelatihan untuk mendukung penggunaan senjata dan jasa terkait dengan keamanan Saudi. Amerika mengirimkan tenaga ahli di bidang militer ke Arab Saudi untuk membangun instalasi militer di Saudi. Persetujuan ini menjadi dasar hubungan keamanan Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Tetapi hal yang paling penting dalam melandasi hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat, adalah akses minyak Arab Saudi dan sikap Amerika Serikat untuk melindungi Monarki Arab Saudi ini dari ancaman pihak luar. Faktanya adalah ketika Arab Saudi menghadapi serangkaian serangan dari kelompok-kelompok bersenjata atau ancaman dari negara-negara luar seperti Iran

atau Irak pada Perang Teluk II, Amerika Serikat menjadi pelindung utama Arab Saudi.

Rivalitas antara Arab Saudi dan Iran tak muncul begitu saja dalam ruang hampa, melainkan terbentuk oleh sejarah panjang sejak keduanya menjadi negara modern. Pernah menjalin hubungan yang cukup harmonis, sejak revolusi Iran pada 1979, praktis hubungan keduanya cenderung diwarnai oleh berbagai konflik dan ketegangan. Sebagai dua negara yang memegang peranan kunci di Timur Tengah, keduanya saling berebut pengaruh untuk menjadi negara hegemon yang mengendalikannya negara-negara kecil di kawasan tersebut.

Arab Saudi dan Iran yang terlibat dalam rivalitas untuk memperebutkan pengaruh di kawasan turut mengambil kesempatan dari konflik yang terjadi di negara-negara yang lemah tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan pengaruh politik mereka. Arab Saudi dan Iran tidak hanya terlibat dalam perang proksi satu sama lain, kini mereka bahkan melakukan intervensi militer langsung, salah satunya di Yaman.

Berdasarkan analisis dari bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan mengapa Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat meskipun banyak isu internasional yang berpotensi mengganggu hubungan tersebut yaitu disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kondisi politik dalam negeri Arab Saudi yaitu penguasa mengalami krisis legitimasi kekuasaan, sehingga Arab Saudi membutuhkan bantuan Amerika Serikat agar tidak dijatuhkan. Selain itu ada pengaruh dari peran Ulama terhadap kebijakan dalam negeri maupun luar negeri terhadap Raja Arab Saudi.
2. Kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi yang lemah menyebabkan Arab Saudi membutuhkan Amerika untuk mengolah minyak dan Arab Saudi membutuhkan keamanan bagi lingkungan sekitarnya.
3. Konteks internasional yaitu adanya persaingan Arab Saudi dengan Iran.

B. Saran

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya melanjutkan pada rentan waktu selanjutnya, mengingat batasan observasi penelitian ini hanya berkisar pada konflik di kurun waktu 2013 – 2017.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih memperluas sampel penelitian tidak hanya pada Arab Saudi, namun sebaliknya bisa diambil dari sisi USA, sehingga penelitian tentang topik ini akan lebih luas, detil, akurat dan komprehensif.
3. Penelitian yang akan datang sebaiknya juga mempertimbangkan faktor-faktor kebijakan dalam negeri dan kebijakan lain yang mendukung terbentuknya hubungan yang stabil.